

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

RISIKO STAGFLASI GLOBAL DI DEPAN MATA, PEMERINTAH HARUS BERSIAP

Hikmatul Fitri, Dwi Resti Pertiwi, M. Anggara T. Siregar



Kondisi di mana harga-harga barang terus meningkat, gangguan pasokan energi dan pangan, serta suku bunga naik memberikan sinyal bahwa krisis baru pada perekonomian dunia akan terjadi. Ekonomi dunia akan terperangkap pada kondisi pertumbuhan yang rendah namun di sisi lain terjadi tekanan inflasi yang terus meningkat atau dikenal dengan sebutan stagflasi. Tak terkecuali Indonesia, stagflasi ini bukan lagi menjadi suatu perkiraan namun ancamannya telah ada di depan mata. Secara spasial tekanan inflasi pada September 2022 terjadi di semua wilayah dan telah melebihi batas target inflasi maksimal 4% yaitu 5,95% (yoy).

Inflasi yang terus melonjak ditambah berbagai tekanan ekonomi global di tahun mendatang semakin mengancam risiko terjadinya stagflasi. Dalam *World Economic Outlook* Oktober 2022, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 menjadi 2,7 persen dibanding proyeksi bulan Juli sebesar 2,9 persen. IMF menjelaskan perlambatan pertumbuhan di negara maju, kenaikan suku bunga, risiko iklim dan berlanjutnya harga pangan dan energi yang tinggi memberi dampak tekanan bagi negara-negara berkembang. World Bank (2022) menyebutkan negara berkembang menghadapi prospek jangka pendek yang cukup menantang. Aspek utama

yang menjadi tantangan negara berkembang antara lain harga pupuk dan energi yang meningkat signifikan, kenaikan suku bunga acuan, *credit spread*, depresiasi mata uang hingga *capital outflow*.

Lebih lanjut, kebijakan bank sentral di seluruh dunia yang menaikkan suku bunga dengan tujuan mengatasi inflasi telah memberi dampak yaitu merosotnya kegiatan ekonomi yang berakibat pada kualitas kredit perbankan. Dalam keadaan darurat seperti itu, dunia usaha, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah harus bersinergi sehingga dapat menghindari terdapatnya kebijakan tumpang tindih bahkan kontradiksi. Dalam mengantisipasi stagflasi ke depan, industri jasa keuangan (IJK) harus memegang prinsip *three lines of defense*, yaitu manajemen lembaga keuangan yang *prudent* dengan penerapan *good corporate governance* (GCG), inovasi, dan penerapan manajemen risiko yang baik.

Dalam kondisi seperti ini negara-negara berkembang harus dapat mencari *exit strategy* dari tekanan inflasi selain dengan cara menaikkan suku bunga acuan seperti yang terjadi saat ini. Efisiensi fiskal dengan target pengeluaran lebih diarahkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Dana pendidikan, kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim diharapkan dapat menjadi prioritas untuk negara-negara berkembang. Langkah tersebut juga dikombinasikan dengan strategi untuk mengurangi tingkat utang yang membebani negara. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, perekonomian Indonesia pada tahun depan dinilai tidak sampai mengalami pertumbuhan negatif, namun diprediksi akan melambat. Perlambatan terjadi sebagai akibat melemahnya dua sumber yaitu lesunya ekspor dan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal. Penurunan kinerja ekonomi global akan menjalar ke dalam negeri meskipun koreksi ekspor akan sedikit minimal karena Indonesia masih dapat menikmati berkah dari harga komoditas. Pemerintah dapat menjaga perlambatan kinerja ekonomi agar tidak semakin dalam dengan tetap menjaga daya beli masyarakat karena separuh ekonomi Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga. Daya beli masyarakat yang tergerus dan tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup serta bantuan pemerintah yang tidak memadai, maka berpotensi besar masyarakat rentan masuk ke garis kemiskinan. Perlu dilakukan langkah antisipasi dari tekanan inflasi yang tinggi agar tidak semakin berdampak lebih jauh terhadap perekonomian.